

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. PENDAHULUAN
a. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dari urusan wajib non pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan dan urusan pilihan bidang ketransmigrasian di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- Tujuan :
- Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja.
- Bidang Ketenagakerjaan
 - 1. Meningkatkan tingkat kesempatan kerja
 - 2. Meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja
 - Bidang Ketransmigrasian
 - 1. Terciptanya pemantapan transmigran

2. Belanja, Program APBD dan Program APBN

Untuk jenis belanja, dapat diuraikan sebagai berikut :

Belanja Operasi	Rp.	30.266.982.124
1. Belanja Pegawai	Rp.	25.688.755.000
a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	25.688.755.000
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	4.458.227.124
3. Belanja Hibah	Rp.	
4. Belanja Modal	Rp.	120.000.000

Total Pagu Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 30.266.982.124,- yang terdiri atas :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	28.945.800.324
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.448.151.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkatdaerah	40.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100.000.000
Administrasi Umum Perangkat daerah	411.819.547
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	20.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.025.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	780.829.777
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	340.000.000
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan klaster kompetensi	340.000.000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	333.750.000
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	225.000.000
Perlindungan PMI Di daerah Provinsi	50.000.000
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi dalam 1 Daerah provinsi	45.000.000

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	166.762.000
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI, Mogok Kerja dan penutupan Perusahaan yg berakibat/berdampak pd kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	72.612.000
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	93.150.000
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	317.936.000
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	317.936.000
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	133.368.300
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	133.368.300
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	29.365.500
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan	29.365.500

Sedangkan total pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.3.169.072.000,-

- a) APBN Tugas Pembantuan
 - Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) Rp.3.169.072 .000.

3. Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

Sesuai dengan target yang tercantum pada RPJMD dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja
2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
3. Persentase Penyandang Disabilitas bekerja di Sektor Formal (%)
4. Cakupan Kebersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi
5. Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS)
6. Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kab/kota
7. Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundang Undangan Bidang Ketenagakerjaan
8. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal
9. Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya
10. Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial
11. Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya
12. Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan
13. Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang
14. Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan

4. Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Kewilayahan

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tersebar di beberapa lokasi, sebagaiberikut :

- 1 Kota Palembang

2 Kota Prabumulih

3 Kota Lubuk Linggau

4 Kota Pagar Alam

5 Kabupaten Ogan Ilir

6 Kabupaten MUBA

7 Kabupaten Lahat

8 Kabupaten Muara Enim

9 Kabupaten Empat Lawang
- 10 Kabupaten OKU

11 Kabupaten OKU Timur

12 Kabupaten OKU Selatan

13 Kabupaten OKI

14 Kabupaten Banyuasin

15 Kabupaten Musi Rawas

16 Kabupaten Muratara

17 Kabupaten PALI

b. Latar BelakangPenyusunanLaporan.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Gubernur Nomor : 001/SE/Bappeda/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021 sertasebagai bahan masukan PD dalam Menyusun perencanaan tahun berikutnya.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN HINGGA TRIWULAN INI.

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan IV ini pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program / kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat daerah dan DIPA APBN.

1) Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan.

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	KEU %
Belanja Operasi	30.146.982.124	27.962.440.871	92,75
Belanja Pegawai	25.688.755.000	24.020.520.651	93,51
Belanja Barang Jasa	4.458.227.124	3.941.920.220	88,42
Belanja Modal	120.000.000	119.530.000	99,61
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.000.000	119.530.000	99,61
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	-	-	-
Total	30.266.982.124	28.081.970.871	92,78

2) Realisasi Belanja Perangkat Daerah Dana APBN Provinsi Sumatera Selatan.

PROGRAM	PAGU	REALISASI		
		KEU (Rp)	%	FISIK %
Tugas Pembantuan	3.169.072.000	3.044.547.100	96,07	-
P2KTRANS	3.169.072.000	3.044.547.100	96,07	
	5.910.254.000	3.044.547.100	96,07	

b. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	35	58,82	168
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	8,00	5,65	70,6
3	Persentase Penyandang Disabilitas bekerja di Sektor Formal (%)	Persen	23	0,79	3,43
4	Cakupan Kebersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	Persen	49	35,79	73,04
5	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS)	Persen	65	46,73	71,9
6	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kab/kota	Persen	73	73	100
7	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundang Undangan Bidang Ketenagakerjaan	Persen	71	70,26	98,9
38	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	Persen	40,00	36,74	91,8
9	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Persen	2,7	-	-
10	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Orang	390.000	244.042	62,58
11	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Orang	537.920	180.126	33,40
12	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100
13	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Persen	100	100	100
14	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Persen	100	100	100

c. Penghargaan yang diperoleh perangkat Daerah

- Tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan menjadi Provinsi Terbaik Ketiga pada Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Kategori Besar.

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kendala yang dihadapi:

- 1 Pada Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tidak melaksanakan Kegiatan yang bersumber APBN Dekonsentrasi dikarenakan status anggarannya di blokir abadi.
- 2 Sumber Daya Manusia khususnya pegawai yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai bidang teknis yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memasuki masa pensiun sedangkan kaderisasi masih berproses.

b. Tindak Lanjut yang diperlukan.

1. Mengoptimalkan personil yang tersedia pada Bidang teknis masing-masing, melengkapi tata kelola keuangan dan administrasi satker sesuai ketentuan yang berlaku dan menyusun program kerja beserta time schedule.
2. Memanfaatkan tenaga kerja yang ada semaksimal mungkin dan mengusulkan penambahan Pegawai Negeri Sipil sesuai bidang ilmu dan kebutuhan teknis Dinas.

IV. PENUTUP.